

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Permasalahan pencemaran udara adalah permasalahan lingkungan hidup yang sering ditemui di kota-kota besar di Indonesia. Kota Yogyakarta juga sedang mengalami hal yang serupa. Yogyakarta adalah kota yang melekat dengan predikat sebagai kota budaya dan sekaligus kota pelajar. Predikat tersebut membuat Yogyakarta menjadi kota yang banyak didatangi oleh wisatawan yang hanya sekedar berlibur maupun mahasiswa yang akan melanjutkan studi dan menetap di kota pelajar ini. Seiring waktu jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta semakin meningkat setiap tahunnya (Tokan, 2015: 3). Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

No	Tahun	Domestik	Mancanegara	Jumlah
1.	2013	4.366.164	306.301	4.672.465
2.	2014	5.025.155	226.197	5.251.292
3.	2015	5.388.352	230.879	5.619.231
4.	2016	5.217.534	249.211	5.520.952

Sumber Data : Kota Yogyakarta dalam Angka 2014-2017

Bertambahnya jumlah wisatawan dapat dilihat dari meningkatnya pembangunan hotel dan semakin banyaknya jumlah kendaraan yang melintas di jalanan kota setiap harinya. Meningkatnya jumlah pendatang bukan hanya memberikan dampak positif, yaitu meningkatnya pendapatan daerah, tetapi juga memberikan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari meningkatnya populasi di Kota Yogyakarta adalah meningkatnya jumlah kendaraan yang berada di Kota Yogyakarta maka dampak tersebut dapat meningkatkan gas buang atau emisi gas buang kendaraan (Tokan, 2015: 3). Berikut jumlah kendaraan bermotor ada di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 1.2:

**Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta
Tahun 2013-2016**

No	Jenis Kendaraan	2013	2014	2015	2016
1.	Mobil Penumpang	48.163	51.737	54.546	59.401
2.	Bus	2.161	2.213	2.233	2.226
3.	Mobil Beban	13.287	13.433	13.875	14.149
4.	Kendaraan Khusus	246	259	273	280
5.	Sepeda Motor	361.318	381.770	399.616	415.749
	Jumlah	425.175	449.412	470.542	491.805

Sumber Data : Kota Yogyakarta dalam Angka, 2014 – 2017

Dalam pengelolaan lingkungan wilayah yang perlu diperhatikan dari dampak pencemaran udara di Kota Yogyakarta yaitu mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) karena pencemaran udara tidak hanya diakibatkan bertambahnya kendaraan bermotor dan mobil, industri, tetapi juga kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau khususnya pada wilayah perkotaan mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut yaitu meningkatkan produksi oksigen dan menyerap karbondioksida.

Menurut Dahlan (1992: 68 dalam Adiatma, 2011: 2) berdasarkan kondisi ideal, semakin tinggi populasi masyarakat yang menghuni suatu wilayah, maka ruang terbuka yang tersedia seharusnya juga semakin luas. Akan tetapi pada kenyataannya, seiring dengan jumlah penduduk yang bertambah padat, maka harga lahan menjadi lebih mahal, peruntukan lahan yang semakin beraneka ragam sehingga mempersempit ruang terbuka yang tersedia.

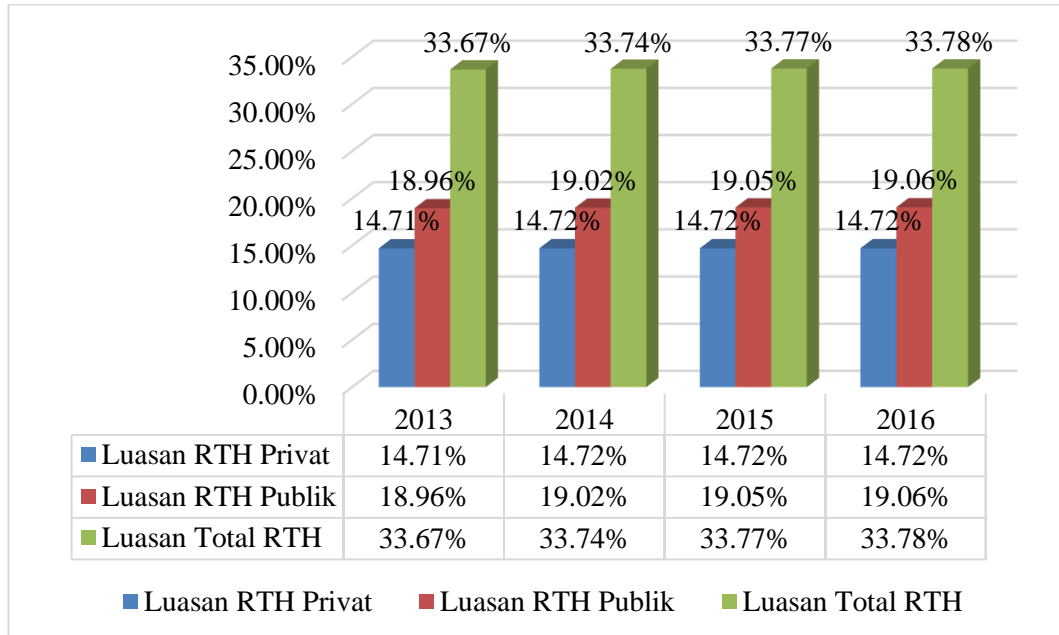
Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mengatasi pencemaran udara yang telah menjadi masalah global di negeri ini, diantaranya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, peraturan ini dimaksudkan untuk mencegah, dan membatasi, pencemaran udara termasuk gangguan dan kebisingan, baik dari sumber tidak bergerak maupun dari sumber bergerak. Selain upaya pencegahan, Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup, dalam hal ini meningkatkan mutu udara ambien. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan cara melakukan pengujian emisi secara berkala terhadap kendaraan bermotor,

melakukan sosialisasi terkait dampak pencemaran udara dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Tokan, 2015: 6).

Sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa Ruang Terbuka Hijau merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik secara alamiah maupun sengaja ditanam. Dalam sebuah kota, persentase luas Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari wilayah kota. Lahan menjadi permasalahan dalam penyediaan ruang terbuka hijau karena lahan di Kota Yogyakarta telah banyak difungsikan menjadi bangunan keras dengan sedikit atau bahkan tidak menyediakan untuk penghijauan. Apabila ini terus terjadi maka lingkungan hidup di Kota Yogyakarta semakin minim terutama Ruang Terbuka Hijau.

Kualitas lingkungan hidup dapat didefinisikan dalam berbagai aspek, seperti penyelesaian optimum penyediaan infrastruktur dan distribusi fasilitas sosial dengan meminimalisir penggunaan bermotor dan lebih memperhatikan pemanfaatan fasilitas lingkungan perumahan yang menekankan pada pencapaian dengan berjalan kaki (Yuliastuti, 2010: 93 dalam Adiatma, 2011: 2). Pengendalian pembangunan perkotaan seharusnya diseimbangkan dengan kondisi lingkungan sekitar. Dalam mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan diperlukan peran ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, pengendalian pencemaran udara sangat penting dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan ruang terbuka hijau agar dapat meningkatkan kualitas udara sehingga udara memiliki mutu yang dapat digunakan sesuai dengan fungsinya (Adiatma, 2011: 8).

Grafik 1.1 Presentase Luasan RTH Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016



Sumber Data : LAKIP Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2016

Berdasarkan grafik presentase luasan RTH Kota Yogyakarta merupakan hasil kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) dengan kegiatan Pemeliharaan Taman Kota dan Peningkatan Taman Kota, yang menghasilkan output pembangunan taman kota meningkat seluas 6.390 m² dengan pembangunan taman kota di Jl. Soga (300 m²), Jl. Soka (640 m²), Jl. KHA Dahlan (520 m²), Jl. Kapas (1.850 m²) dan Jl. Kartini (896 m²). Selain itu pemeliharaan rutin juga dilakukan di sejumlah ruas jalan yang ada di Kota Yogyakarta.

Menurut Tokan (2015: 9) dalam strategi pemerintah guna mengatasi permasalahan ketersediaan lahan dalam penyediaan RTH di Kota Yogyakarta membuat pemerintah perlu melakukan inovasi maupun teknik penghijauan dalam

rangka penyediaan RTH. Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan membuat konsep taman pergola dan penanaman pohon ditengah (devinder) jalan. Konsep taman pergola ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga diwajibkan kepada pelaku usaha untuk membuat atau memasang pergola dilahan yang tidak memungkinkan ditanami pohon sebagai persyaratan izin usaha. Penanaman pohon ditengah jalan dilakukan didalam pot atau buis. Hal ini agar akar pohon tidak merusak struktur jalan, selain itu juga berguna untuk menekan pertumbuhan pohon agar tidak tumbuh besar dan mengganggu pengguna jalan.

Pengelolaan RTH yang menjadi salah satu upaya dalam rangka mengurangi pencemaran udara dengan bentuknya yang berupa penanaman pohon/tanaman yang dapat menyerap zat-zat yang dihasilkan dari gas emisi kendaraan bermotor dan juga dapat difungsikan untuk meredam kebisingan yang terjadi di daerah perkotaan. Agar pengelolaan RTH berjalan dengan efektif menurut Dwihatmojo (2013: 3) pemerintah harus mampu menyediakan RTH bagi masyarakat sehingga memberikan kenyamanan karena lingkungannya yang berkualitas. Identifikasi ketersediaan RTH perlu dilakukan sehingga pemerintah mengetahui ketersediaan RTH sebagai salah satu bahan evaluasi dalam menentukan arah kebijakan dan perlindungan RTH. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Upaya ini dilakukan untuk memberikan hak masyarakat dan mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang. Masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

Dari pernyataan di atas menjadi alasan bagi peneliti untuk memilih judul “*Evaluasi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam Kaitan dengan Pencemaran Udara*” yaitu karena pencemaran terjadi dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, dalam hal ini adalah akibat dari semakin banyaknya jumlah kendaraan di kawasan perkotaan akan menimbulkan berbagai macam polusi udara yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau berpengaruh terhadap pencemaran udara karena sesuai dengan fungsinya memperbaiki lingkungan, menjaga iklim, sebagai pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara. Alasan peneliti memilih tempat yang akan diteliti yaitu Kota Yogyakarta, karena Kota Yogyakarta adalah salah satu kota yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat.

Pertumbuhan kota yang tidak terkendali mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan terbangun seperti mall, hotel, perkantoran sehingga semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kota ini juga merupakan kota yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan setiap hari, dan pelajar yang datang dan menetap. Dengan bertambahnya penduduk Kota Yogyakarta bertambah juga jumlah kendaraan yang menyebabkan polusi udara meningkat.

Peneliti mengevaluasi tahun 2013-2016 dengan alasan pada tahun tersebut dalam bidang lingkungan hidup, pemerintah Kota Yogyakarta menerima penghargaan piala Adipura yang menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan

hidup perkotaan dengan baik dalam kategori Kota Besar Terbersih 2013. Studi kasus pada penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Untuk itulah maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: **Evaluasi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Kaitan dengan Pencemaran Udara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2013 – 2016**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : “Bagaimana evaluasi kebijakan program pengelolaan ruang terbuka hijau yang berkaitan dengan pencemaran udara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada tahun 2013 - 2016 ?”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya program pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dapat mempengaruhi program dalam mengurangi pencemaran udara Kota Yogyakarta tahun 2013-2016.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan atau referensi bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan tema dan topik penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

1.5 KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori merupakan gambaran dari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga kejadian menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi, dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatian (Efendi dan Singarimbun, 1989: 37). Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Evaluasi Kebijakan Publik

1.5.1.1 Definisi Evaluasi Kebijakan

Menurut Dwijowijoto (2003: 183), evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai.

William N. Dunn (1999: 608), mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Dari beberapa pengertian evaluasi kebijakan menurut para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk menilai keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan, juga melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah telah mampu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

1.5.1.2 Sifat Evaluasi

Menurut William N.Dunn (1999: 608), evaluasi mempunyai sejumlah sifat yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya:

a. Fokus nilai

Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak teantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

b. Interdependensi Fakta-Nilai.

Untuk mengetahui kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat; untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

c. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau

Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).

d. Dualitas Nilai.

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

1.5.1.3 Kriteria Evaluasi Kebijakan

Menurut William N.Dunn (1999: 610) dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Tipe-tipe kriteria tersebut sebagai berikut :

Tabel 1.3
Kriteria-Kriteria Evaluasi Menurut William N. Dunn

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai.	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.	Unit biaya, manfaat bersih, rasio cost-benefit
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah.	Biaya tetap efektifitas tetap
Pemerataan (equality)	Apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat.	Kriteria Pareto, Kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu.	Konsistensi dengan survei warganegara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan bermanfaat dan memiliki nilai.	Program publik harus merata dan efisien

1.5.2 Ruang Terbuka Hijau

1.5.2.1 Definisi Ruang Terbuka Hijau

Menurut Joga dan Ismaun (2011 : 91) Ruang Terbuka Hijau (*Green Open Space/Green Space*) merupakan lahan-lahan alami yang ada di wilayah perkotaan.

Bentuk ruang terbuka hijau yang berupa fasilitas umum/publik, sebagai tempat beraktivitas, adalah taman kota, taman pemakaman, lapangan olahraga, hutan kota, dan lain-lain yang memerlukan area lahan/peruntukan lahan hijau secara definitif.

Ruang Terbuka (*Open Space*) merupakan ruang terbuka yang selalu terletak di luar massa bangunan yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh setiap orang serta memberikan kesempatan untuk melakukan bermacam-macam kegiatan. Yang dimaksud dengan ruang terbuka antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota dan taman rekreasi (Hakim, 2003 : 50).

Undang – Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mendefinisikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan yang termasuk ruang terbuka hijau privat adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibagi menjadi :

1. Kawasan hijau pertamanan kota
2. Kawasan hijau hutan kota
3. Kawasan hijau rekreasi kota
4. Kawasan hijau kegiatan olahraga
5. Kawasan hijau pemakaman

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Ruang Terbuka Hijau kawasan Perkotaan mendefinisikan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTH–KP) sebagai bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

1.5.2.2 Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dalam INMEDAGRI Nomor 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah, sebagai berikut :

- a. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan;
- b. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan kehidupan lingkungan;
- c. Sebagai sarana rekreasi;
- d. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan maupun udara;

- e. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan;
- f. Sebagai tempat perlindungan plasma nuftah
- g. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro;
- h. Sebagai pengatur tata air.

1.5.2.3 Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dalam INMEDAGRI Nomor 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan bahwa manfaat yang dapat diperoleh dari ruang terbuka hijau kota antara lain :

- a. Memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan;
- b. Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota;
- c. Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga dan buah.

1.5.2.4 Faktor Pengelolaan RTH

- a. Fisik (dasar eksistensi lingkungan), bentuknya bisa memanjang, bulat maupun persegi empat atau panjang atau bentuk-bentuk geografis lain sesuai geotopografinya.
- b. Sosial, RTH merupakan ruang untuk manusia agar bisa bersosialisasi.
- c. Ekonomi, RTH merupakan sumber produk yang bisa dijual
- d. Budaya, ruang untuk mengekspresikan seni budaya masyarakat

- e. Kebutuhan akan terlayannya hak-hak manusia (penduduk) untuk mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, indah dan lestari.
(Hasni, 2009: 229)

1.5.2.5 Tujuan Pembentukan RTH

Dalam INMEDAGRI Nomor 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan bahwa tujuan pembentukan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan.
- b. Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

1.6 DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan berbagai teori yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas. Agar dapat dimengerti dan dipahami dengan jelas. Adapun definisi konseptual dari penelitian ini adalah :

- a. Evaluasi Kebijakan Publik adalah suatu kegiatan yang dirancang oleh pemerintah melalui berbagai tahapan dengan menilai keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan yang bertujuan mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

- b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu lahan/kawasan alami yang difungsikan sebagai taman kota dengan ditanami tumbuhan sebagai pengendali pencemaran udara, pengendali tata air, dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

1.7 DEFINISI OPERASIONAL

Definisi ini merupakan variable-variabel yang sudah dibahas dalam definisi konsep dan kerangka dasar teori. Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka perlu diberikan batasan-batasan yang diidentifikasi dengan tujuan untuk menjawab masalah penelitian. Definisi yang digunakan adalah, sebagai berikut :

1.7.1 Efektivitas

Indikator yang diukur berkaitan dengan hasil yang ingin dicapai, yaitu :

- a. Peningkatan Pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan
- b. Peningkatan kualitas udara di Kota Yogyakarta

1.7.2 Efisiensi

Indikator yang diukur berkaitan dengan usaha yang diperlukan serta besar biaya dan sumberdaya yang digunakan, yaitu :

- a. Anggaran yang disediakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pengelolaan RTH
- b. Kerja sama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta dalam melaksanakan program pengelolaan RTH publik

1.7.3 Kecukupan

Indikator yang diukur berkaitan dengan pencapaian hasil yang diharapkan dalam menyelesaikan masalah kebijakan, yaitu :

- a. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar minimal 20% dari luas wilayah
- b. Peningkatan Ketersediaan lahan dalam penyediaan RTH di Kota Yogyakarta

1.7.4 Pemerataan

Indikator yang diukur dari biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok masyarakat, yaitu :

- a. Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana dalam pengelolaan RTH untuk Kota Yogyakarta
- b. Keberadaan RTH sebagai fasilitas umum telah dimanfaatkan oleh masyarakat secara merata

1.7.5 Responsivitas

Indikator yang diukur berkaitan dengan aspek kepuasan masyarakat khususnya kelompok sasaran atau hasil kebijakan, yaitu :

- a. Adanya kesadaran dari masyarakat dalam menjaga lingkungan perkotaan
- b. Peran masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik

1.7.6 Ketepatan

Indikator yang diukur berkaitan dengan tujuan dari kebijakan berguna dan bernilai bagi masyarakat, yaitu :

- a. Lokasi penempatan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- b. Manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1.8 METODE PENELITIAN

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. (Afrizal, 2016: 13)

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta, maka perlu dilakukan evaluasi terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta.

1.8.2 Jenis Data

Secara garis besar data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 jenis, antara lain sebagai berikut :

1.8.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2007: 91).

Data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terkait dengan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta. Data primer dalam penelitian ini meliputi : observasi, dan hasil wawancara.

1.8.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia (Azwar, 2007: 91).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : buku, jurnal, catatan, dokumentasi, internet, dan media massa lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan, yaitu :

- a. Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta
- c. Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta

- d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- e. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan oleh dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2005: 72).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam berdasarkan pertanyaan yang umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara (Afrizal, 2016 : 21).

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai informan yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti., agar peneliti dapat mengetahui secara pasti program-program serta upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkaitan dengan pencemaran udara yang akan digunakan sebagai data penelitian. Unit analisa yang diteliti yaitu ada tiga (3) perwakilan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, diantaranya :

Tabel 1.4 Rincian Wawancara

Narasumber	Nama Narasumber	Instansi
Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Ibu Rina Arianti	Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)
Kepala Seksi Pertamanan dan Perindang Jalan	Bapak Pramu Harianto	Seksi Pertamanan dan Perindang Jalan
Staf Seksi Pertamanan dan Perindang Jalan	Bapak Nur Hariadi	Seksi Pertamanan dan Perindang Jalan

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam, dimana pewawancara dan informan terlibat percakapan dan tatap muka dalam waktu yang telah disepakati.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data berupa bahan tertulis seperti berita di media , notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan (Afrizal, 2016: 21).

1.8.4 Teknik Analisa Data

Miles dan Huberman (1984 dalam Sugiyono, 2005: 91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Berikut langkah-langkah Analisa data menurut Miles dan Huberman :

a. Data Collection (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

b. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti.

c. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

d. Verification (Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal dan interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2005: 92).